

AUDITED

**LAPORAN TAHUNAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI KEUANGAN
BARANG MILIK NEGARA
(SIMAK-BMN)
PUSAT VETERINER FARMA TH. 2017**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

PUSAT VETERINER FARMA

Jl. A. Yani 68-70 Surabaya 60231

Telp. (031) 8291124 - 8291125, Fax. (031) 8291183

e-mail : pusvetma@pertanian.go.id, pusvetma.kementan@yahoo.com

website : pusvetma.ditjennak.pertanian.go.id



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA	
I. PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum	1
B. Entitas Pelaporan	3
C. Periode Pelaporan	3
II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	3
A. Penyeragaman Penggolongan dan Kodefikasi Barang	5
B. Penyajian Barang Milik Negara sesuai Bagan Akun Standar	6
C. Kebijakan Kapitalisasi Barang Milik Negara	6
D. Rekonsiliasi Nilai Barang Milik Negara	7
III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN	8
IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA	10
A. Saldo Awal	10
B. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara	11-45
V. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA	45
A. Perkembangan Nilai Barang Milik Negara	45
B. Informasi Pengelolaan Barang Milik Negara	45
C. Informasi Terkait Barang Milik Negara Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang	47
D. Barang Milik Negara Berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya	49

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA PUSAT VETERINER FARMA
(018.06.0500.237551.000.KD)
PERIODE PELAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;

D. BMN BERUPA BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA (BPYBDS)

Tidak terdapat Barang Milik Negara yang masuk sebagai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada PUSAT VETERINER FARMA (018.06.0500.237551.000.KD) periode Tahunan 2017

E. PERMASALAHAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara antara lain:

- Penatausahaan BMN terkait dengan Instansi lain.

F. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara pada PUSAT VETERINER FARMA (018.06.0500.237551.000.KD), langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Koordinasi dengan Instansi terkait .

Penanggung Jawab UAKPB

KEPALA PUSAT VETERINER FARMA



Drs. ENUH RAHARDJO DJUSA, Ph.D

NIP. 195905131986031013

27